

**TINJAUAN YURIDIS TANGGUNG JAWAB
PEMERINTAH KOTA BEKASI SEBAGAI PENYEDIA
LAYANAN SOSIAL BAGI GELANDANGAN DALAM
PENANGGULANGAN KEMISKINAN BERDASARKAN
PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI NO. 4 TAHUN
2018 TENTANG PENANGGULANGAN KEMISKINAN.**

SKRIPSI

**Oleh:
Wulandari Mustapia
201610115055**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2020**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Tanggung Jawab Pemerintah Kota Bekasi Sebagai Penyedia Layanan Sosial Bagi Gelandangan Dalam Penanggulangan Kemiskinan Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bekasi No. 4 Tahun 2018 Tentang Penanggulangan Kemiskinan.

Nama Mahasiswa : Wulandari Mustapia

Nomor Pokok Mahasiswa: 201610115055

Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum

Bekasi, 18 Juli 2020

MENYETUJUI,

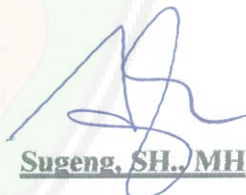
Pembimbing I



Rahmat Ferdian Andi Rosidi, SHL., MH.

NID. 011606048

Pembimbing II



Sugeng, SH., MH

NID. 011611058

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Tanggung Jawab Pemerintah Kota Bekasi Sebagai Penyedia Layanan Sosial Bagi Gelandangan Dalam Penanggulangan Kemiskinan Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bekasi No. 4 Tahun 2018 Tentang Penanggulangan Kemiskinan.

Nama Mahasiswa : Wulandari Mustapia

Nomor Pokok Mahasiswa : 201610115055

Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 18 Juli 2020

Bekasi, 18 Juli 2020

MENGESAHKAN,

Ketua Penguji : Dr. Hotma P Sibuea, SH., MH.

NID. 011904085

Penguji I : Dr. Yurnal, SH., M.Hum.

NID. 011805008

Penguji II : Dr. Dwi Seno Widjanarko, SH., MH.

NID. 011703061

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi

Ilmu Hukum

Dekan

Fakultas Hukum

Jantarda Mauli Hutagalung, S.Pd., SH., MH.

NIP. 1901378

Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, SH., MH., MM.

NIP. 2001450

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wulandari Mustapia
NPM : 201610115055
TTL : Bekasi, 22 Juli 1997
Prodi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "*Tinjauan Yuridis Tanggung Jawab Pemerintah Kota Bekasi Sebagai Penyedia Layanan Sosial Bagi Gelandangan Dalam Penanggulangan Kemiskinan Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bekasi No. 4 Tahun 2018 Tentang Penanggulangan Kemiskinan*" adalah benar-benar merupakan asli karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan, dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bekasi, 18 Juli 2020

Yang membuat pernyataan,



Wulandari Mustapia

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wulandari Mustapia
NPM : 201610115055
TTL : Bekasi, 22 Juli 1997
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : SKRIPSI

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non Exclusive Royalty- Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **“Tinjauan Yuridis Tanggung Jawab Pemerintah Kota Bekasi Sebagai Penyedia Layanan Sosial Bagi Gelandangan Dalam Penanggulangan Kemiskinan Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bekasi No. 4 Tahun 2018 Tentang Penanggulangan Kemiskinan”** Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*) mendistribusikannya, menampilkan / mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta. Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi. Dengan pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Bekasi, 18 Juli 2020

Yang membuat pernyataan



Wulandari Mustapia

ABSTRAK

Wulandari Mustapia. 201610115055. *Tanggung Jawab Pemerintah Kota Bekasi Sebagai Penyedia Layanan Sosial Bagi Gelandangan Dalam Penanggulangan Kemiskinan.*

Kemiskinan merupakan salah satu faktor penyebab gelandangan di Kota Bekasi yang memiliki masalah kesenjangan sosial. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 34 menjelaskan bahwa fakir miskin dipelihara oleh negara dapat memberikan perlindungan terhadap gelandangan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 menegaskan dalam eksistensi urusan pemerintahan konkuren yang dibagi bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang sesuai dengan cakupan penyelenggaraan kesejahteraan, salah satunya yaitu dengan urusan pemerintahan wajib dibagi menjadi urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar yang dapat diterima oleh gelandangan kemudian adanya kesejahteraan sosial yang dapat diterima oleh gelandangan.

Penelitian yang dilakukan adalah dengan menggunakan metode kualitatif dan menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan melakukan penelitian terhadap asas-asas hukum dan undang-undang atau peraturan yang berkaitan dengan. Penelitian ini mengkaji dengan menggunakan studi kepustakaan berupa sumber hukum primer, sekunder, dan tersier.

Berdasarkan hasil penelitian, pada Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 4 Tahun 2018 tentang penanggulangan kemiskinan tidak menjelaskan secara rinci apakah gelandangan termasuk orang yang dilindungi dalam perda tersebut sehingga menjadi bertolak belakang dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 34, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin. Selain itu terdapat beberapa aspek yang belum terpenuhi bagi gelandangan salah satunya seperti pendidikan selama 9 tahun, kelayakan tempat tinggal dan fasilitas Kesehatan yang seharusnya dapat dirasakan bagi gelandangan masyarakat miskin semakin miskin dan terpuruk, dan gelandangan yang semakin banyak karena tingkat kesejahteraan yang diterima oleh masyarakat miskin masih kurang dari yang seharusnya, serta gelandangan jauh dari keadaan hidup yang layak.

Kata Kunci: Kemiskinan, Fakir Miskin, Kesejahteraan.

ABSTRACT

Wulandari Mustapia. 201610115055. *The Responsibilities of the Bekasi City Government as a Social Service Provider to the Homeless in Poverty Reduction.*

Poverty is one of the factors causing homeless people, and it is also an inequality problem in Bekasi city. Based on Constitutional Law year 1945 of Republic Indonesia article 34 explain that the government should take care of the poor and also giving a protection to the homeless. It is also emphasize the existance of concurrent government affair on the Law Number 23 year 2014 which shared with central government and regional govenrment, it is contain welfare management that one of the government affairs must be divided into mandatory government affairs related to basic services that can be received by the homeless and there is social welfare that can be received by the homeless.

The method used in this research are qualitative method and juridis normative approach with doing research about principle of law and articles or rules that obtain with. This research concerning using study of library in the primary, secondary, and tertiary source of law's.

Base on this research, the regulation of Bekasi City Number 4 year 2018 about Poverty Alleviation, it does not explain in detail whether the homeless people are protected in the local regulation or not. It is contrary to Constitutional Law year 1945 of Republic Indonesia article 34, and Law Number 13 year 2011 about Handling of the Poor. In addition, there are several aspects that has not been fulfilled for homeless people, one of them is education for 9 years, the feasibility of housing and health facilities that should be given to the poor and homeless people. It is getting poorer and worse for the homeless people because of the level of welfare received by the poor are still less than it should, and also the homeless are far from decent living conditions.

Key Word: *Poorness, Vagrant, Walfare State.*

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur Penulis panjatkan kepada Allah SWT. yang telah memberikan limpahan rahmat dan karunia-Nya yang tidak terhingga. Sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan tepat waktu dengan segala keterbatasan dan kekurangan.

Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat bagi Penulis untuk dapat menyelesaikan studi program strata satu pada Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Skripsi ini berjudul **“TINJAUAN YURIDIS TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH KOTA BEKASI SEBAGAI PENYEDIA LAYANAN SOSIAL BAGI GELANDANGAN DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI NO. 4 TAHUN 2018 TENTANG PENANGGULANGAN KEMISKINAN.**

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini tidak mungkin dapat terselesaikan tanpa adanya bantuan dan dukungan dari pihak lain, baik secara moril dan materil. Oleh sebab itu, menulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung penulisan skripsi, yakni kepada:

1. Inspektur Jendral Polisi (Purn) Dr. Drs. H. Bambang Karsono, SH., MM., selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Dr. Ika Dewi Sartika Saimma, SH., MH., MM., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Dr. Dwi Atmoko, SH., MH., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
4. Elfrida Ade Putri, SH., MH., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
5. Dr. Gatot Elfrianto, SH., MH., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
6. Dr. Ir. M. Hanafi Darwis, SH., MH., selaku Dosen Pembimbing Akademik

yang telah membantu dan memberikan arahnya selama Penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

7. Rahmat Ferdian Andi Rosidi, SHI., MH., selaku Dosen Pembimbing Materi Skripsi yang telah banyak memberikan ilmu dan arahan selama penulisan skripsi.
8. Sugeng, SH., MH., selaku Dosen Pembimbing Teknis Skripsi yang telah banyak memberikan ilmu dan arahan selama penulisan skripsi.
9. Bapak dan Ibu Dosen serta Asisten Dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan arahan kepada penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
10. Seluruh Staf dan Karyawan Tata Usaha Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
11. Teman-teman kelas A1 yang telah banyak memberikan banyak canda dan tawa serta semangat selama Penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
12. Adi Purwo Satriyo Partner saya yang sudah memberikan semangat serta dukungan kepada penulis selama Penulis Menyusun skripsi ini hingga dapat menyelesaikan dalam menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
13. Maretta Della Swastika Putri teman saya dari semester 1 hingga sekarang, yang sudah memberikan semangat selama Penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
14. Widya Anggraeni dan Firi Tazkiyah Sahabat saya yang sudah memberikan semangat kepada Penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.
15. Teman-teman Group Kejujuran yang telah memberikan semangat dan hal-

hal lucu selama perkuliahan.

16. Seluruh teman angkatan 2016 Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
17. Seluruh civitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
18. Seluruh pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan, namun tidak dapat disebutkan satu persatu oleh Penulis.

Tidak lupa Penulis juga mengucapkan banyak terimakasih dan rasa syukur kepada kedua orang tua, Fanji Suwardi dan Sopiiah yang telah mendidik Penulis, serta memberikan dukungan kasih sayang, dan kesempatan bagi Penulis untuk dapat mengenyam pendidikan di perguruan tinggi. Ucapan terimakasih juga Penulis ucapkan kepada kakak saya Juni Tri Astuti serta Adik saya Rai Ajeng Ashari yang telah mendukung dan memberikan doa kepada Penulis. Dan keponakan saya Keyanu yang paling lucu sehingga membuat penulis semakin bersemangat dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata, Penulis memiliki harapan agar skripsi ini memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya, terutama untuk kemajuan ilmu hukum. Penulis juga mengharapkan masukan dan kritikan yang membangun apabila terjadi kesalahan dalam penulisan skripsi ini.

Penulis



Wulandari Mustapia

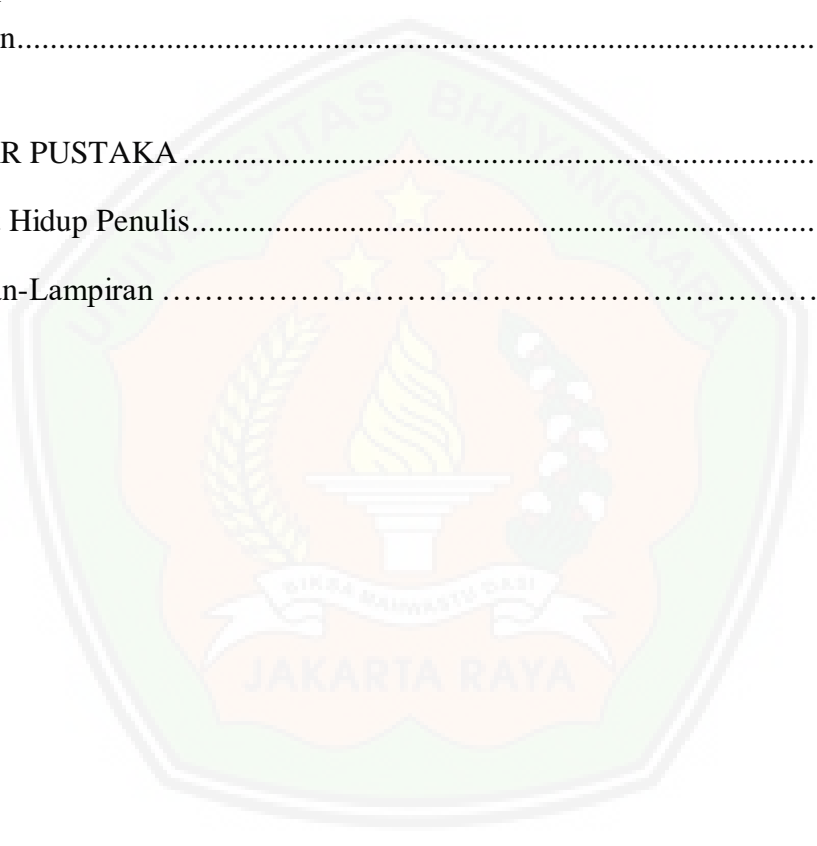
201610115055

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah	11
1.1.1 Identifikasi Masalah	11
1.1.2 Rumusan Masalah	12
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian	12
1.3.1 Tujuan Penelitian.....	12
1.3.2 Manfaat Penelitian.....	12
1.4 Kerangka Teoritis, Konseptual, dan Pemikiran	13
1.4.1 Kerangka Teoritis	13
1.4.2 Kerangka Konseptual	20
1.4.3 Kerangka Pemikiran	22
1.5 Metode Penelitian	23
1.5.1 Jenis Penelitian.....	23

1.5.2 Pendekatan Penelitian.....	23
1.5.3 Sumber Bahan Hukum.....	23
1.5.4 Teknik Pengumpulan Data.....	24
1.6 Sistematika Penulisan.....	24
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	26
2.1 Pengertian Fakir Miskin	26
2.2 Pengertian Gelandangan.....	28
2.2.1 Penyebab Munculnya Gelandangan	31
2.3 Kemiskinan.....	32
2.4 Negara Hukum.....	35
2.5 Kesejahteraan.....	37
2.6 Standar Pelayanan Minimal.....	41
BAB III METODE PENELITIAN	44
3.1 Jenis Penelitian	44
3.2 Pendekatan Penelitian	45
3.3 Metode Pendekatan.....	47
3.4 Sumber dan Jenis Bahan Hukum	48
3.5 Teknik dan Sumber Pengumpulan Data.....	50
3.6 Metode Analisis Bahan Hukum.....	51
3.7 Lokasi Penelitian.....	51
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	52
4.1 Tinjauan Yuridis Mengenai Mekanisme Dalam Penanganan Gelandangan Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Penanggulangan Kemiskinan.....	52
4.1.1 Penanganan Fakir Miskin	52
4.1.2 Penyelenggara Kesejahteraan Sosial.....	61
4.1.3 Pemenuhan Hak-Hak Dasar Gelandangan	65

4.1.4 Tugas dan Wewenang Pemerintah Dalam Penanganan Fakir Miskin	68
4.2 Perlindungan Sosial Terhadap Gelandangan Di Kota Bekasi	71
4.2.1 Perlindungan Hak Gelandangan Pada Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018.	74
4.2.2 Perlindungan Terhadap Hak Gelandangan.	77
BAB V PENUTUP	83
5.1 Simpulan.....	83
5.2 Saran.....	84
DAFTAR PUSTAKA	86
Riwayat Hidup Penulis.....	92
Lampiran-Lampiran	93



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Penduduk Miskin Di Bekasi 8



MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Hidup adalah soal keberanian, menghadapi yang tanda tanya, tanpa kita mengerti tanpa kita bisa menawar. Terimalah dan hadapilah!

– Soe Hoe Gie

Persembahan skripsi ini penulis berikan kepada:

1. Keluarga tercinta, Ayahanda Fanji Suwardi, Ibunda tercinta Sopiah, serta kakak Juni Tri Astuti, dan adik Rai Ajeng Ashari atas segala cinta, kasih sayang, dukungan, nasehat, pengorbanan, serta ketulusan doa yang tiada henti;
2. Segenap guru dari pertama kali penulis belajar hingga sekolah menengah atas dan dosen Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, terima kasih telah memberikan limpahan ilmu yang tak ternilai dengan suatu apapun;
3. Almamater Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang penulis banggakan;

